

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Adjie Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT Refika Aditama, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MPN)*, Rfika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sanksi Perdaya dan Administratif terhadap Notaris*, Rafika Aditama, Bandung.
- Anshori Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif hokum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hlm 8. GHS Lumban Tobing, 1 983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke III, Erlangga, Jakarta.
- Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Mahja Djuhad, 2005, *Undang-Undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Durat Bahagia, Jakarta.
- Manullanh, 2001, *Dassar-dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marzuki Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta.
- Raharjo Satjipto, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan kritis tentang Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Aktra*, Mandar Maju, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, yogyakarta.
- Sudiyono, 2004, *Manajemen Pendidikan Tinggi*, Buku Pegangan Kuliah, PT Rianeka Cipta, Jakarta.

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan C*, CV.Alfabeta, Bandung.

Sumardjono Maria SW, 2014, *Bahan kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sunggono Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutopo Ariesto Hadi, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.

Tedjosaputro Liliana, 1995, *Etika Profesi Notaris: dalam Penegakan Hukum Pidana*, PT.Bayu Indah Grafika, Yogyakarta.

Thiha Mifta, 2004, *Pembinaan Organisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Tobing GHS Lumban, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, cetakan ke III, Erlangga, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembaran tahun 2014 Nomor 54991)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, dan Tata Kerja Majelis Pengawas.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02. PR 08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Nomor : W.30-01. AH.02.11 Tahun 2017 Tentang perubahan kedua keputusan kepala Kantor wilayah kementerian Hukum dan HAM Papua Nomor W.30-08.AH.02.11 Tahun 2016 Tentang pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Jayapura sPeriode Tahun 2016-2019.

**Jurnal :**

Annisa Amelia, 2017, *Pembinaan dan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Terhadap Notaris Yang Terkena Sanksi Pelanggaran Jatan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nur Cahyaningtias, 2017, “Peran Majelis Pengawas Dalam Pembinaan Notaris di Kota Magelang”, *Tesis*, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**Website :**

<https://media.neliti.com/media/publications/30013-ID-pengawasan-majelis-pengawas-daerah-terhadap-notaris-setelah-berlakunya-undang-un.pdf>

<https://papua.go.id/view-detail-page-254/Sekilas-Papua-.html>

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profildaerah/kabupaten/id/91/name/papua/detail/9102/jayawijaya, diakses 10-01-2018.>